

PERAN ORMAS DALAM MEMPERTAHANKAN INTEGRASI NASIONAL

Ilham Thohari*

Abstract

National integration is Allah global issue, an issue which is faced by almost all nations and countries in the world. Therefore, national integration is Allah contemporary challenge which has to be faced and overcome by each country.

For a developing country like Indonesia, national integration is an absolute and urgent problem to solve, since without an established and Allah strong national integration and stability the developing process will find its barriers and Allah healthy and balance development will not be created.

National integration will become a national tragedy and threat for Indonesia unless this nation has strong society. The strength of the society will exist if each citizen is aware of the importance of union and unity of nation and country.

Kata kunci: Organisasi masyarakat, integrasi nasional

Pendahuluan

Integrasi nasional merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Namun ia tidak merupakan jaminan masa depan, dalam artian bahwa integrasi nasional akan terjadi begitu saja dan tanpa gangguan serta ancaman. Sebagai bangsa yang plural atas dasar suku bangsa, bahasa, dan agama, ketiga faktor tersebut merupakan aspek paling kuat dalam mendorong disintegrasi.

Faktor penting dalam membangun integrasi nasional adalah kekuatan masyarakat, karena adanya masyarakat yang kuat merupakan syarat yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya integrasi nasional.

Masyarakat yang kuat membutuhkan organisasi kemasyarakatan yang kuat. Sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan mempunyai posisi strategis dalam mendinamisasi kekuatan masyarakat dan pada akhirnya menguatkan integrasi nasional.

Pluralitas Masyarakat Indonesia

Pluralitas bangsa adalah dalam suatu negara memiliki bermacam suku, bahasa, agama dan budaya yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Leo Suryadinata¹ bahwa Indonesia adalah negara yang multietnis dan multiagama. Indonesia dikatakan sebagai negara yang plural, karena Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, bahasa dan budaya

Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk, baik atas suku-bangsa, bahasa, maupun agama. Mungkin, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang memiliki sifat kemajemukan seperti Indonesia, kurang lebih terdiri dari dua ratus lima puluh

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Tarbiyah

¹ Lihat. A. Ubaidillah dkk. *Pendidikan kewargaan : Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta, IAIN Jakarta Press. 2000. hal.10

suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang sejarah dan budaya tertentu. Kemajemukan tersebut masih ditambah dengan kenyataan penyebarannya di ribuan pulau yang terpisah satu dari yang lain.

Interaksi antara faktor sosio-historis dan faktor geografis melahirkan suatu corak komitmen kultural yang kuat diantara suku-suku Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, komitmen kultural dikalangan berbagai suku-bangsa di Indonesia tidak hanya merupakan penjelmaan dari rasa kesukuan atau kesadaran kolektif yang mempunyai tanda batas atau identitas yang bersifat nilai-budaya, tapi juga merupakan penjelmaan dari solidaritas sosial yang mempunyai tanda batas geografis, karenanya memiliki keterkaitan geografis yang sangat kuat. Sehingga konsep “kejawaan” atau “kesumatraan”, mengandung konotasi budaya (nilai-nilai) dan konotasi kedaerahan (lingkungan) sekaligus.

Keanekaragaman suku bangsa merupakan aspek paling kuat dalam mendorong disintegrasi bangsa. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia, menurut data empiris, relatif tinggi. Salah satu indikasinya adalah masalah etnik dan linguistik. Diperkirakan, di Indonesia terdapat 250 suku bangsa dan bahasa, dan Indonesia menempati pada peringkat ke-119 dalam daftar negara-negara dunia mengenai persentase homogenitas (keseragaman).²

Meskipun demikian bangsa Indonesia mampu menjaga dan memelihara pluralisme dan keberagaman dengan baik, demikian kata Presiden Amerika Serikat George Walker Bush. Ia mengatakan bahwa rakyat AS harus belajar dari Indonesia mengenai keberagaman hidup. Sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mampu membuktikan kepada dunia internasional suatu keharmonisan hidup bersama tanpa perbedaan. Indonesia memainkan peranan penting dalam memperlihatkan kepada dunia suatu kenyataan dimana masyarakat dapat hidup bersama penuh kedamaian dan keselarasan.³

Integrasi dan Disintegrasi Bangsa

Integrasi bangsa ialah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Masyarakat itu merupakan masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras, dan agama.

Integrasi bangsa berarti penggabungan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelompok budaya itu saling dihubungkan dengan lebih erat. Arah kecenderungan yang akan terjadi bersumber dari masyarakat kecil menjadi masyarakat besar.

Integrasi bangsa secara garis besar dapat tercapai dengan dua pola kebijakan yang ditempuh pemerintah. Pertama, penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan mengembangkan semacam “lebudayaan nasional”, kebijakan ini disebut sebagai asimilasi. Kedua, pembentukan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil, kebijakan ini disebut kebijakan kesatuan dalam perbedaan, yang secara politik ditandai dengan penjumlahan etnis.⁴

² Abdul Rozak, dkk, “*Buku Suplemen*” Pendidikan Kewargaan. Jakarta.Prenada Media.2004.hal. 9

³ Investor Daily, 21/11/06

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. Grasendo.1992. hal.52

Adapun disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang terpisah. Dan disintegrasi dapat mengarahkan bangsa ini pada apa yang disebut Soekarno hampir setengah abad lalu sebagai *nation in collaps*.

Integrasi bangsa mempunyai dua dimensi. Pertama, dimensi horisontal, yaitu berupa masalah yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan suku, ras, agama. Dimensi ini sering pula disebut sebagai masalah yang disebabkan oleh pengaruh ikatan-ikatan “primordial” yang ada dan hidup di dalam sebuah masyarakat yang bisa membahayakan kelangsungan proses integrasi nasional bilamana ia sampai menjelma menjadi perasaan loyalitas yang lebih tinggi terhadap kelompok-kelompok subnasional semacam itu daripada kepada kesatuan bangsa itu sendiri.

Kedua, dimensi vertikal, berupa masalah yang ditimbulkan oleh muncul dan berkembangnya semacam jurang pemisah (*gap*) antara golongan elit nasional yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar rakyat biasa (*massa*). Keadaan seperti ini akan menimbulkan rasa keterpencilan atau keterasingan anggota-anggota masyarakat banyak dari kaum elit yang memimpin dan berkuasa. Akibatnya, partisipasi massa rakyat ini di dalam bernegara sangat kecil.⁵

Menurut DR. M. Din Syamsudin⁶, ada tiga macam fanatisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Pertama, *land* (tanah) dan *blood* (darah) keduanya sering digabung menjadi “tanah tumpah darah”. Dua sumber fanatisme ini melahirkan solidaritas kesukuan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Masing-masing dari kedua hal tersebut acapkali melahirkan fanatisme yang kuat dalam kehidupan umat manusia. Kesamaan “tanah kelahiran” menimbulkan kesadaran kolektif sebagai satu daerah yang melahirkan sukuisme, sedangkan kesamaan “darah” menimbulkan kesadaran kolektif sebagai satu keturunan yang kemudian membentuk margaisma.

Kedua, Komitmen kultural yang merupakan manifestasi dari dua sumber fanatisme di atas, pada giliran berikutnya, dapat menampilkan sentimen kultural, yaitu rasa keberkelompokan yang cenderung eksklusif. Hal ini, menimbulkan perasaan “orang kita” (*in group feeling*) dan “orang lain” (*out group feeling*). Perasaan demikian dapat menimbulkan suatu sentrisme, yaitu menganggap kelompok sendiri lebih baik dan menganggap kelompok orang lain lebih rendah. Sentimen kultural inilah yang sering menimbulkan konflik kultural dan konflik sosial. Pada suku-suku primitif, konflik demikian sering kali mengambil bentuk peperangan.

Ketiga, agama merupakan sumber fanatisme yang baru setelah masuk dan berkembangnya agama-agama di Indonesia. Dibandingkan dengan sumber fanatisme terdahulu, yaitu tanah dan darah, agama dapat merupakan sumber fanatisme dan basis solidaritas yang lebih kuat. Hal ini disebabkan karena komitmen keagamaan berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai pencipta manusia dan sumber kebenaran mutlak.

⁵ DR. Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta Gramedia 1978 hal 200

⁶ Lihat. Dr. M. Din Syamsudin. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 2000. hal. 118-119

Adanya ketiga sumber fanatisme dalam kehidupan bangsa Indonesia, secara teoritis dapat merupakan faktor disintegrasi bangsa. Namun, suatu hal yang menggembirakan dan patut disyukuri bahwa eksistensi sumber-sumber fanatisme tadi tidak mengalami penghimpitan dan pemisahan yang tegas. Maksudnya, eksistensi suku tertentu tidak berhimpit dengan kepelemukan agama tertentu, yang berbeda dengan eksistensi suku lain yang berhimpit dengan kepelemukan agama tertentu. Penghimpitan agama dan suku akan mengakibatkan fanatisme ganda, yakni fanatisme keagamaan dan kesukuan sekaligus. Jika hal ini terjadi maka proses integrasi bangsa akan terganggu.

Adanya “persilangan budaya” (cultural crossing) antara agama dan suku di Indonesia merupakan peredam konflik yang sangat berarti. Sehingga karena faktor agama, Islam umpamanya, maka terjadi peredaman sentimen kultural antara suku Minang dan suku Jawa yang kebetulan sama-sama memeluk agama Islam. Dengan demikian, agama, pada kenyataan sosio-historis di Indonesia, merupakan faktor perekat keragaman kesukuan dan integrasi bangsa yang signifikan.

Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini juga mengandung muatan pluralisasi atau pemajemukan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya individualisme bangsa atau kelompok baik atas dasar etnis atau pun agama. Pada skala global gejala ini ditunjukkan oleh berdirinya negara-negara baru, atau pemisahan diri negara-negara tertentu dari sebuah ikatan federasi. Dalam konteks kita bangsa Indonesia, kecenderungan pluralisasi atau pemajemukan ini membawa tantangan tambahan terhadap kemajemukan bangsa. Sehingga tantangan yang kita hadapi di masa depan bersifat ganda, yaitu: adanya realitas kemajemukan dan kemungkinan pemajemukan.

Potensi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan pilar bangsa dan negara. Karena pada dasarnya bangsa dan negara itu terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dan mencapai tujuan mereka.

Kranenburg, seperti yang dikutip Suheno, mengatakan bahwa negara itu pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurut Kranenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut⁷.

Menurut Roger H. Soltau, negara didefinisikan sebagai alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. lain halnya dengan apa yang dikemukakan Harold J. Laski. Menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.⁸

⁷ Suheno. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty. 1993. hal.142

⁸ Dede Rosyada dkk. *Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003. hal.42

Negara merupakan lembaga politik yang terjelma dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia atau masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi negara, dalam hal ini, meniscayakan adanya perpaduan, meminjam istilah Hegel, antara “kebebasan subyektif: (*subjective liberty*), yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan “kebebasan objektif” (*objectine liberty*), yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar.⁹

Dalam perspektif sejarah kebangsaan kita, kekuatan masyarakat memainkan peranan penting dan menentukan dalam pembentukan Negara Republik Indonesia. Berbagai kekuatan telah memberikan andilnya, baik dalam perjuangan menentang penjajahan maupun dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan.

Kekuatan bangsa Indonesia dapat dilihat sejak awal abad 20. mula-mula diawali dengan berdirinya Budi Oetomo pada tahun 1908 sebagai organisasi non pemerintah, kemudian disusul organisasi-organisasi lainnya, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dawam Rahardjo, mengatakan bahwa Boedi Oetomo yang lahir 1908 bisa disebut sebagai organisasi masyarakat yang pertama di Indonesia.¹⁰

Kekuatan masyarakat ini lahir dari nasionalisme atau paham kebangsaan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad 20. pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan dikalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Para anlisis nasionalisme beranggapan bahwa Islam memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan nasionalisme ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengkaji nasionalisme Indonesia George Mc. Turnan Kahin bahwa Islam yang disebutnya sebagai agama Muhammad bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib (*in group*) menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain.¹¹

Dengan terbentuknya negara kekuatan-kekuatan masyarakat tadi tidaklah hilang, bahkan tetap memiliki eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kekuatan-kekuatan masyarakat tersebut merupakan potensi nasional yang penting dalam melangsungkan reformasi disegala bidang sebagai realisasi cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Bahkan reformasi dewasa ini meniscayakan adanya partisipasi masyarakat yang besar. Tanpa partisipasi masyarakat, proses reformasi yang sehat akan sukar terjadi. Disinilah letak arti penting dari kekuatan masyarakat.

Lebih dari itu, aktualisasi kekuatan masyarakat juga menentukan kualitas pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dianut. Dengan kata lain, kekuatan masyarakat akan mendorong proses demokrasi dan demokratisasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila tetap memberi tempat bagi aktualisasi dan artikulasi dari kekuatan-kekuatan masyarakat, namun

⁹ Op.cit. hal.122

¹⁰ M. Budairi. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Jakarta. E-law Indonesia. 2002. hal.68

¹¹ Op. cit. Hal.26

harus tetap diselenggarakan dalam kerangka permusyawaratan dan pemufakatan seperti diamanatkan Pancasila.¹²

Organisasi Masyarakat

Dalam konteks demokrasi Pancasila, semua kelompok dalam masyarakat, tak terkecuali organisasi kemasyarakatan Islam—sebagai potensi nasional—mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ormas-ormas yang berbasis keagamaan dituntut untuk ikut andil dalam memberikan jawaban atas problem kongkrit di masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis multidimensional yang sangat luar biasa. Pada tahun 1997 bangsa ini mengalami krisis moneter yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat ekonomi bawah. Hal ini juga diperparah oleh ketertinggalan dan kemunduran umat Islam dari dunia internasional.

Akar permasalahan dari krisis multidimensi bangsa ini justru bermula pada krisis etika para Elit yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum, selanjutnya merambah pada maraknya serta menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua sendi kehidupan. Kondisi ini pun didukung oleh lemahnya komitmen para pemimpin bangsa. Tampaknya kepentingan-kepentingan politik masih mendominasi penegakan hukum di Indonesia. Dari akar permasalahan tersebut telah mengakibatkan banyak dampak negatif pada kehidupan sosial, dan ekonomi yang berujung pada rusaknya etika moral bangsa¹³.

Adalah suatu ironi bahwa suatu bangsa yang sering disebut sebagai bangsa yang sopan, halus dan berbudaya tinggi, juga sekaligus sering disinyalir sebagai bangsa yang korupsi. Oleh karena itu tidak ada persoalan masa depan bangsa kita ini yang lebih penting dan lebih serius daripada persoalan menegakkan etika atau akhlak bangsa. Secara introspeksi kita harus mengakui bahwa dalam hal etika, bangsa kita masih cukup lemah, jika tidak sangat lemah.

Miskipun sebagian besar rakyat beragama Islam, tetapi salah satu tujuan ajaran agama Islam, sebagai *al-Furqon*, yaitu pemisah yang tegas antara yang *haq* (benar) dan yang *bathil* (palsu) belum sepenuhnya dihayati oleh warga negara. Kelemahan etika bangsa yang antara lain akibat lemahnya semangat *al-Furqon* dikalangan kaum Muslim itu tercermin dalam ketidakmampuan banyak penanggung jawab kenegaraan kita untuk membedakan dengan jelas mana benar mana salah, mana kejujuran mana penyelewengan, mana terpuji mana tercela, mana kontribusi dan mana korupsi.

Kelemahan etika atau akhlak ini pula yang menyebabkan mengapa sering terjadi suatu penyelewengan itu dalam ukuran yang sangat besar dan bersifat fatal, ternyata dapat dimaafkan dan dilupakan begitu saja. Kelemahan etika ini pula menyebabkan banyak pemimpin dan penanggung jawab kenegaraan, sementara rajin mengucapkan ritual-ritual nasional seperti pernyataan kesetiaan kepada UUD dan Pancasila, namun tidak memiliki

¹² Op.cit. hal.123

¹³ Qadri Azizy. Membangun Integritas Bangsa. Jakarta. Renaisan.2004.hal.VII

kepekaan secukupnya terhadap masalah-masalah sosial, dan tidak menyadari adanya berbagai kepincangan dalam masyarakat.¹⁴

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hal ini berarti bahwa didalam pemerintahan bangsa ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara demi keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Wujud partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang ada dua bentuk cara berserikat yaitu, melalui yayasan dan organisasi massa (Ormas).

Jumlah ormas yang ada di masyarakat sangat banyak, maka dapat dikelompokkan menurut umurnya, misalnya ormas kalangan remaja (Pramuka, IPPNU,IRM), ormas pemuda (Karang Taruna, FKPPI,AMPI), dan dewasa atau pensiunan (Pepabri). Ada ormas yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam mendarmabaktikan pada masyarakat, misalnya keagamaan (Muhammadiyah, NU, Persis), cendekiawan (ICM), PIKI, ISKA), profesi disiplin keilmuan (IDI, PII, IKADIN), serta ada juga yang dikelompokkan berdasarkan hobi, olah raga dan kesenian.¹⁵

Sebagai kekuatan masyarakat yang terorganisaasi, ormas Islam misalnya, secara teoritis memiliki beberapa kekuatan. Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki keabsahan eksistensial moral. Eksistensi ormas Islam mempunyai legitimasi teologis, sosiologis, dan politis. Disamping itu, ormas Islam merupakan potensi-potensi pembangunan. Penguatan potensi-potensi tersebut dapat menjadi pilar dalam pengembangan demokrasi dan demokratisasi dalam kerangka politik pembangunan berdasarkan pancasila¹⁶.

Ole karena itu, organisasi-organisasi kekuatan masyarakat, baik bidang agama, politik, maupun sosial kemasyarakatan, dituntut mampu untuk memfungsikan diri sebagai agen reformasi sosial dan agen artikulasi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini tidak hanya merupakan manifestasi dari tanggung-jawab sosial, tapi juga merupakan kontribusi dalam pengembangan kedaulatan rakyat.

Namun, organisasi-organisasi kekuatan masyarakat dalam bidang agama, politik, dan sosial kemasyarakatan, agaknya belum berfungsi ideal maupun optimal, baik karena kemandirian mereka, maupun karena lilitan problem internal.

Problem Internal Ormas

Problem mendasar organisasi kemasyarakatan adalah problem "aktualisasi diri" (*self actualization*), yaitu kesukaran yang dihadapi sebagian besar organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda, untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki. Organisasi kemasyarakatan agaknya mengalami pelemahan kepercayaan diri, dan cenderung menjadi lembaga-lembaga yang kurang kreatif dan berinisiatif.

Keadaan diatas mungkin disebabkan oleh faktor internal yaitu kepemimpinan organisasi itu sendiri. Organisasi kemasyarakatan secara umum, mengalami penurunan fungsi sebagai

¹⁴ DR. Nurchalish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta. Paramadina. Hal.86-87

¹⁵ Chairil Anwar. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2000. hal.95

¹⁶ Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini sistem politik yang ideal adalah demokrasi pancasila, karena melalui sistem politik ini masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu akan mampu mengatur dengan baik kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam satu negara.

agen reformasi sosial dan faktor instrumental dalam ikut memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.

Dalam hal ini, faktor kepemimpinan sangat menentukan kualitas peran organisasi kemasyarakatan. Pelemahan peran organisasi kemasyarakatan lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk menyikapi dinamika eksternal yang begitu cepat. Sebagai akibatnya, organisasi kemasyarakatan terkesan mengalami stagnasi dan kehilangan pesona. Keadaan ini mempengaruhi dukungan masyarakat itu sendiri terhadap organisasi kemasyarakatan.¹⁷

Oleh karena itu organisasi masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya beriktikad baik tetapi mampu memperankan kehendak politik dan budaya politik yang mereka miliki. Menurut Cak Nur, mereka harus mampu menampilkan *ing ngarso sung tuloda* (“di depan memberi teladan”). Adagium ini tidak hanya benar sebagai petunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin, tetapi justru lebih benar lagi karena ia menggambarkan kenyataan sosial apa yang menjadi akibat dari peranan kepemimpinan. Yakni, ungkapan itu menunjukkan bahwa para pemimpin, mau tidak mau, akan berperan sebagai teladan untuk yang dipimpin.¹⁸

Lebih dari itu Cak Nur menegaskan, bahwa seorang pemimpin tidak dibenarkan hanya mengandalkan iktikad baiknya sendiri saja sekalipun iktikad baik itu secara ikhlas ia kaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan atau iman. Setelah menanamkan dengan penuh keyakinan iktikad baik itu dalam kalbunya, ia dituntut untuk mengejawantahkan iktikad itu dalam praktek nyata, menjadi perbuatan-perbuatan etis dan bermoral.

Pemimpin yang benar-benar beriktikad baik harus senantiasa bersedia meletakkan substansi iktikadnya itu dan perwujudannya keluar dibawah pengujian umum melalui mekanisme kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran. Kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran itu, tidak saja diharapkan akan menghasilkan pengukuhan komitmen bersama pada suatu kebenaran atau mengembangkan dan menemukan kebenaran-kebenaran baru secara progresif, tapi juga untuk secara bersama mendapatkan jalan bagi pelaksanaan komitmen pada kebenaran itu dalam realitas lingkungan sosial dan fisik yang ada.

Organisasi kemasyarakatan perlu terus tampil sebagai kekuatan moral dan kultural untuk mendorong proses pembangunan nasional. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang tangguh, dinamis, dan profesional.

Penutup

Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang majemuk, baik atas suku-bangsa, bahasa, maupun agama. Kemajemukan tersebut masih ditambah dengan kenyataan penyebarannya di ribuan pulau yang terpisah satu dari yang lain.

Potensi disintegrasi bangsa Indonesia relatif tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-199 dalam daftar negara-negara dunia mengenai persentase homogenitas (keseragaman).

¹⁷ Op. cit. hal. 125

¹⁸ Op. cit. hal.14

Keanekaragaman suku bangsa merupakan aspek yang paling kuat dalam mendorong disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan integrasi bangsa diharapkan peran serta organisasi-organisasi kemasyarakatan baik dalam bidang keagamaan, politik dan sosial untuk terus berperan aktif, positif, dan konstruktif yang baik dan kuat dalam menunjang kukuhnya integrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian.Ph.D. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta. Gramedia. 1978
- Budairi. Muhammad.SH.M.Hum. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Jakarta. E-Law Indonesia. 2002
- Din Syamsudin. M. DR. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 2000
- Madjid, Nurcholish.Dr. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta. Paramadina.1999
- Rosyada. Dede.dkk. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003
- Rozak, Abdul. Dkk. *Pendidikan Kewargaan: Suplemen*. Jakarta. Prenada Media. 2004
- Soeheno, SH. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Leberty. 1993
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia. 1992